

KYAI DAN ISLAM DALAM MEMPENGARUHI PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA

Nurlatipah Nasir
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP)
Tasikmalaya, Jawa Barat
Email: nasir.nurlatifah@gmail.com

Abstract

Huntington claimed that political participation is a concept that unknown in Islamic societies. Indonesia proved that Huntington was wrong, as the largest muslim country in the world, the participation level in general election is quite high. As a study case, Tasikmalaya even more unique, while the Islamic party in some places experiencing the trend of declining votes, then in Tasikmalaya remained stable. The stability of the Islamic Party in Tasikmalaya is supported by various factors, especially by the role of Kyai, the leader of muslim societies.

Pendahuluan

Islam dan demokrasi seringkali dianggap sebagai dua hal yang tidak dapat berjalan bersama, seperti yang diungkapkan oleh Huntington yang mengklaim bahwa partisipasi politik merupakan konsep yang asing dalam masyarakat Islam. Jika ada partisipasi politik dalam masyarakat Islam, maka hal itu pasti terkait dengan kegiatan keagamaan, bukan kegiatan politik non-keagamaan. Hal ini dikarenakan dalam Islam tidak ada perbedaan antara komunitas keagamaan dan komunitas politik. (dikutip oleh Saiful Mujani, dkk: 2012).

Indonesia merupakan Negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, dimana 88% penduduknya memeluk agama Islam. Runtuhnya rezim Orde Baru pada Tahun 1998 telah mengantarkan perubahan sistem pemerintahan yang sebelumnya otoriter ke dalam masa transisi demokrasi. Transisi demokrasi yang dijalankan di Indonesia mendapatkan pujian dari Menlu AS Hillary Clinton yang menganggap Indonesia sebagai panutan demokrasi bagi dunia Muslim. Demikian juga, Presiden

Obama memuji demokrasi Indonesia sebagai contoh yang baik bagi dunia (Assyaukanie: 2012).

Mempelajari bagaimana interaksi antara Islam dan demokrasi di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik. Hasil survey dari Pemilu tahun 1999 sampai tahun 2009 menunjukkan sebuah fakta bahwa memilih dalam Pemilu maupun pilpres bukan sesuatu yang asing dalam komunitas muslim. Hal ini menunjukkan bahwa klaim Huntington tidak memiliki dasar yang cukup kuat dalam masyarakat Indonesia. Jika klaim Huntington tersebut benar, maka seharusnya masyarakat non-muslim yang datang ke TPS pada saat Pemilu atau Pilpres secara proporsional seharusnya lebih banyak dibandingkan masyarakat Muslim, namun ternyata fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Walaupun memang agama bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang.

Pasca jatuhnya rezim Suharto, Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi atau sering juga disebut sebagai era liberalisasi politik. Salah satunya ditandai dengan terbukanya peluang yang besar bagi munculnya partai-partai politik baru. Menurut catatan Departemen Kehakiman, partai politik yang ada pasca jatuhnya rezim Soeharto mencapai 181 partai politik, dimana 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai partai politik, dan setelah melalui seleksi 48 partai politik disahkan dan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 1999 (Lili Romli, dkk : 2003). Diantaranya adalah partai-partai politik Islam, dari 48 partai peserta Pemilu tahun 1999 terdapat 11 partai politik Islam.

Kiprah partai politik Islam sendiri bukanlah sesuatu yang baru, seperti yang telah kita ketahui pada Pemilu tahun 1955 ada tiga partai Islam yang menduduki lima besar partai dengan perolehan suara terbanyak, yakni Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Namun kemudian Masyumi dibubarkan pada Tahun 1960, dan pada masa pemerintahan Orde Baru partai-partai Islam ini mengalami kebijakan fusi kedalam sebuah partai baru, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kebijakan fusi pada 1973 itu telah mengubur eksistensi NU sebagai partai politik, namun reformasi Politik pasca Orde Baru kemudian mendorong NU untuk mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian memperoleh suara yang cukup signifikan pada Pemilu Tahun 1999. Bahkan PKB mampu mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI mengalahkan Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDIP yang merupakan partai pemenang dalam Pemilu tahun 1999.

Hal yang menarik dari partai-partai politik Islam di Indonesia adalah meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun belum pernah menjadikan Partai Politik Islam sebagai pemenang Pemilu. Bahkan pada perkembangan selanjutnya terjadi trend penurunan perolehan suara partai-partai Politik Islam dari Tahun 1999, 2004 dan 2009. Sebagai contoh adalah PPP yang pada Pemilu tahun 1999 memperoleh 10,7% suara nasional, kemudian pada tahun 2004 perolehan suaranya turun menjadi 8,15% dan pada tahun 2009 semakin turun yakni menjadi 5,33%.

Ketika secara nasional trend perolehan suara partai Islam semakin menurun dari pemilu tahun 1999 sampai 2009, hal ini tidak terjadi di Kota Tasikmalaya. Sejak Pemilu tahun 1999, pemenang Pemilu selalu didominasi oleh partai-partai politik Islam, dan PPP selalu memperoleh suara terbanyak. Hal ini menjadikan Tasikmalaya sebagai salah satu basis PPP secara nasional.

Tasikmalaya merupakan sebuah kota di Jawa Barat yang dikenal dengan sebutan Kota Santri. Hal ini tidak terlepas dari mayoritas penduduknya yang beragama Islam, yakni 516.739 orang atau 83,65% dari total penduduk. Di Kota Tasikmalaya terdapat 706 Ulama, 467 Mubaligh, 1.956 Khotib, 4 Penyuluh Agama dan 200 Penyuluh Honorer. Selain itu untuk meningkatkan pendidikan agama Islam di Kota Tasikmalaya terdapat 214 Pondok Pesantren dengan 367 Kyai. Pada Tahun 2009 tercatat 19.093 santri mukim dan 29.541 santri tidak mukim (*santri kalong*) tersebar di berbagai pesantren yang ada di Kota Tasikmalaya. Dominasi PPP di Tasikmalaya tidak lepas dari peran Kyai-Kyai yang tersebar di berbagai pesantren tersebut. Tidak

hanya dalam Pemilu legislatif, para Kyai juga ikut berperan dalam Pilkada, diantaranya dengan memberikan pernyataan dukungan resmi terhadap salah satu kandidat dengan menggunakan dalih agama.

Jumlah lembaga pendidikan pesantren, Kyai dan ulama yang cukup banyak, telah memberi warna tersendiri dalam corak kehidupan sosial masyarakat. Salah satu peran para Kyai tersebut adalah dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2009 tentang “Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Ajaran Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya”. Hal ini juga tidak terlepas dari anggota DPR yang mayoritas berasal dari partai Islam, seperti PPP, PAN, PKS, PKB, PBB, dan PBR, bahkan beberapa anggota DPRD merupakan tokoh ulama.

Oleh karena itu, sangat menarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana peran Kyaidan Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat kota Tasikmalaya? Bagaimana partai politik Islam dapat mempertahankan dominasinya di Kota Tasikmalaya?

Kyai Dalam Kehidupan Sosial dan Politik

Studi tentang Kyai sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, diantaranya adalah Clifford Geertz (1981) dalam “Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa” yang meneliti struktur-struktur sosial masyarakat Jawa di Mojokuto. Selain itu juga ada Hiroko Horikoshi (1987) dalam “Kyai dan Perubahan Sosial”. Horikoshi secara konsisten membedakan penggunaan istilah “Kyai” dari “ulama” karena fungsi formal yang diperankannya. Ulama lebih memerankan fungsi-fungsi administratif, sedangkan Kyai cenderung bermain pada tataran kultural.

Horikoshi (1987) menyebutkan bahwa Kyai merupakan pemimpin karismatik dalam bidang agama, dia fasih dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran pengikut-pengikutnya. Sifat khas seorang Kyai adalah terus terang, berani dan blak-blakan dalam bersikap dan bahkan sebagai seorang ahli dia jauh lebih

unggul daripada ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip *ijtihad* (mengenali ajaran-ajaran Islam secara logika). Posisi Kyai dalam masyarakat hanyalah bersifat sementara dan cepat berakhir. Pengaruh Kyai tergantung pada kualitas pribadi, kemampuan dan kedinamisannya, sehingga puteranya yang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan tidak dapat menggantikan kedudukannya.

Sementara Ulama, Horikoshi menggambarkannya sebagai pejabat keagamaan (fungsionaris agama). Dia menjabat urusan agama, pada pranata keulamaan Islam, yang secara tradisional telah dilestarikan oleh keluarga kalangan menengah pedesaan yang kuat yang mengkhususkan diri dalam mencetak kader ulama dan mengambil tanggung jawab dalam menjaga ortodoksi Islam. Setiap ulama desa selalu terkait dengan mesjid tempat dia bertindak sebagai imam sembahyang dan pembawa Khotbah Jum'at. Sebagian besar ulama mengelola *madrasah*, tempat para penduduk desa dan santri berkumpul untuk belajar membaca Al-Quran dan mendengarkan wejangan ulama. Beberapa diantara mereka juga memiliki dan mengurus pesantrennya sendiri.

Di dalam masyarakat Islam, Kyai merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kyai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu secara teologis Kyai juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*waratsat al-anbiya*). Tidak mengherankan jika Kyai kemudian menjadi sumber legitimasi dari persoalan yang dihadapi masyarakatnya, bukan saja pada aspek hukum-hukum keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis Kyai, khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia.

Dalam kajian makalah ini, Kyai yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai karakter seperti yang digambarkan oleh Horikoshi, yakni karismatik namun juga mempunyai dan mengelola lembaga pendidikan pesantren. Tasikmalaya sejak dulu

telah dikenal sebagai Kota Santri karena banyaknya jumlah pesantren yang kini tersebar di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, Kyai atau juga disebut sebagai *ajengan*, merupakan tokoh yang dianggap mempunyai pengetahuan agama yang tinggi, mereka memberikan ceramah/ pengajian kepada masyarakat umum, dan karena pengakuan atas ilmunya tersebut mereka kemudian mempunyai banyak murid (santri). Para Kyai seringkali menjadi bahan rujukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pun mencatat nama seorang Kyai dari sebuah pesantren di Tasikmalaya, yakni KH. Zaenal Mustofa. KH. Zaenal Mustofa merupakan pimpinan pondok pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, beliau memimpin para santri dan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Jepang. Namanya kini diabadikan menjadi nama jalan utama di Kota Tasikmalaya, dan pondok pesantren Cipasung telah melahirkan Kyai-Kyai besar seperti KH. Ilyas Ruhayat (Alm) yang pernah menjabat sebagai Rais AM NU.

Ada tiga nama tokoh Kyai dan pesantren yang paling berpengaruh di Tasikmalaya, yakni Pesantren Miftahul Huda (K.H. Khoer Afandi (Alm)), Pesantren Pereng (K.H. Oot (Alm)) dan Pesantren Cipasung (K.H. Ilyas (Alm)). Di bawah kepemimpinan Kyai tersebut, pesantren mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan jumlah santri yang semakin banyak, selain itu para Kyai tersebut juga mempunyai pengaruh sosial politik yang cukup kuat terhadap santri dan masyarakat Kota dan Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya.

Sepeninggal para Kyai tersebut, pesantren masih berdiri kokoh, namun pengaruh sosial politiknya tidak sebesar ketika Kyai tersebut masih ada. Seperti yang terjadi di Pesantren Miftahul Huda, sepeninggal K.H. Khoer Afandi, terjadi perpecahan dalam internal pesantren terkait afiliasi partai politik mereka, sehingga pengaruh terhadap santri dan masyarakat sekitar pun menjadi terpecah. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Horikoshi (1987), bahwa meninggalnya seorang Kyai yang demikian

biasanya menjadi pertanda berakhirnya fenomena karismatik, dan masyarakat sedikitnya akan kehilangan kekuatan atau daya bagi kelangsungan hidupnya. Walaupun demikian, karisma para Kyai yang masih ada di Tasikmalaya tidak bisa dipandang sebelah mata, mereka masih mampu memberikan pengaruh yang cukup besar dalam bidang sosial dan politik.

Berkaitan dengan terjadinya perubahan-perubahan situasional menyangkut pilihan-pilihan dan kecenderungan politik yang terjadi, secara umum dapat dikemukakan ada dua model Kyai (Miftah Farid: 2003). *Pertama*, model yang lebih memilih diam ketika menghadapi berbagai perubahan sosial politik. Mereka biasanya memilih untuk lebih memperhatikan lembaga pendidikan (dakwah) yang dimilikinya, ketimbang ikut terlibat dalam urusan sosial politik yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan kehancuran lembaga dakwah tersebut. Kyai tipe ini, sering teramat hati-hati dalam menanggapi perubahan sosial politik.

Kedua, model yang cepat tanggap terhadap berbagai perubahan sosial politik yang terjadi. Perubahan bagi mereka merupakan tawaran nilai dari sesuatu yang baru, yang mungkin saja mengandung hal yang lebih baik dari nilai lama. Sehingga dengan demikian dia bisa dikompromikan untuk diterima. Sikap ini membuat mereka lebih berani untuk terjun pada perubahan sosial politik yang terjadi sambil mentransformasikan nilai-nilai lama. Perubahan sosial politik dengan cara ini bisa tetap berjalan dalam jalur yang aman, tidak bersitegang dengan tradisi yang telah berkembang. Kyai tipe ini cenderung agresif, termasuk ikut terlibat membidani kelahiran partai-partai.

Kyai di Tasikmalaya banyak yang dikategorikan sebagai model kedua, Walaupun tidak sedikit juga para Kyai yang memilih untuk tidak melibatkan diri dalam dunia politik. Mereka yang aktif di dunia politik biasanya berafiliasi dengan partai politik Islam terutama PPP. Hal ini ditunjukkan dalam susunan pengurus Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya, masa bakti

2010 – 2015, dari ketua hingga anggota diisi oleh para Kyai dan ulama yang masing-masing memiliki pesantren sendiri.

Keterlibatan para Kyai dalam partai politik sesungguhnya telah ada sejak lama. Hal ini terkait dengan aktifitas para Kyai yang juga merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan mayoritas penduduk di Kota Tasikmalaya merupakan warga NU. Ketika terjadi kebijakan fusi partai pada masa Orde Baru yang meleburkan empat partai Islam termasuk NU kedalam satu partai yakni PPP, maka banyak ulama kemudian aktif di PPP.

Pada Pemilu Tahun 1999, ketika warga NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagian ulama banyak yang ikut bergabung dan ikut berkampanye. Hasilnya pada Pemilu tersebut, PKB memperoleh 5 kursi DPRD, namun PPP tetap menjadi pemenang mayoritas dengan memperoleh 11 kursi. Sosok karismatik Gus Dur sebagai pimpinan PBNU menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap PKB, dan NU sebagai organisasi keagamaan yang paling berkembang di Tasikmalaya. Namun seiring dengan jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan dan adanya perpecahan dalam tubuh internal PKB mengakibatkan perolehan suara PKB semakin menurun, dan para Kyai pun banyak yang menarik dukungannya. Untuk Kota Tasikmalaya, pada Pemilu Tahun 2009 PKB hanya memperoleh 1 kursi. Suara yang sebelumnya mendukung PKB banyak yang kemudian beralih ke partai-partai nasional seperti demokrat dan partai Islam lain, seperti Partai Bintang Reformasi yang memperoleh 4 kursi di DPRD serta PAN yang memperoleh 7 kursi.

Dominasi Partai Islam

Organisasi dan agama termasuk faktor-faktor sosiologis yang diyakini mampu mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Agama diyakini sangat penting dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih partai politik atau kandidat tertentu. Dalam studi-studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Rose dan Urwin

(1969) menyebutkan bahwa agama telah menjadi basis sosial dukungan partai politik di enam belas Negara demokrasi barat. (dikutipoleh Dalton, 2002: hal.155).

Dalam konteks Indonesia, pembilahan politik yang dikaitkan dengan agama telah hadir sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di awal gerakan kemerdekaan telah muncul Sarekat Dagang Islam yang mewakili komunitas Islam dan di sisi lain hadir Boedi Oetomo dan Indische Partij yang sekuler. Demikian halnya pada Pemilu Tahun 1955, partai-partai politik yang berkompetisi memiliki ideologi partai yang cukup jelas, ada Partai Islam, Kristen, dan sekuler. Dan pada Pemilu-Pemilu berikutnya partai Islam ada yang tetap menggunakan ideology Islam, ada juga yang menggunakan ideologi Pancasila namun memiliki basis massa dari organisasi kelslaman tertentu.

Hubungan atau polarisasi agama dengan partai politik dikonseptualisasikan oleh Geertz (1981) sebagai *aliran*. Geertz berpendapat bahwa dukungan dukungan masyarakat Jawa terhadap partai politik dipengaruhi oleh aliran atau orientasi keagamaan dari warganya. Geertz membagi tiga tipe aliran dalam masyarakat Jawa, yakni Santri, Abangan dan Priyayi. Kelompok santri dikaitkan dengan partai-partai yang berasaskan Islam seperti NU dan Masyumi, kelompok abangan dikaitkan dengan partai komunis yakni PKI serta kelompok priyayi dikaitkan dengan partai nasionalis yakni PNI.

Namun demikian, agama bukan hanya tentang identitas, tetapi juga intensitas keberagamaan (religiositas). Dimensi agama ini mungkin lebih penting dalam konteks Muslim Indonesia karena ia lebih bervariasi, dan kurang lebih merupakan pengukur konsep penting religiositas Muslim Indonesia, yakni santri dan abangan (Geertz, 1981) yang banyak mempengaruhi karya kesarjanaan politik dan pandangan politisi tentang politik Indonesia, oleh karena itu secara potensial lebih punya kekuatan untuk menjelaskan partisipasi politik. (Mujani, dkk: 2012)

Dalam konteks religiositas, kelompok santri merupakan kelompok yang dianggap religius dan melaksanakan ritual keagamaannya seperti shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan lain-lain. Sementara kelompok abangan merupakan kelompok yang dianggap sebagai “Islam KTP”, yakni mereka yang mengaku beragama Islam namun jarang melakukan ibadah shalat lima waktu atau puasa Ramadhan.

Dengan menggunakan logika pembilahan sosial berdasarkan agama dan hasil studi Geertz tentang konsep *aliran* dalam mempengaruhi perilaku memilih seseorang, maka seorang muslim cenderung untuk memilih partai atau kandidat yang berplatform Islam dibandingkan dengan yang berplatform agama lain. Namun kemudian hasil Pemilu menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Partai Islam belum pernah menjadi pemenang Pemilu, bahkan perolehan suara partai Islam terus mengalami penurunan di tingkat nasional. Tingkat religiositas seorang Muslim belum tentu menunjukkan pilihannya terhadap partai Islam atau partai sekuler. Pada Tabel 1 berikut merupakan hasil survey LSI terkait preferensi politik kelompok santri dan abangan pada Pemilu Tahun 1999, 2004 dan 2009.

Tabel 1

Santri dan Abangan Pada Pemilih Partai (%)

		PDIP	Golkar	PKB	PPP	PD	PKS	PAN	Gerindra	Hanura
Santri	1999	64	82	95	91	Na	Na	88	Na	Na
	2004	64	74	89	89	70	81	87	Na	Na
	2009	65	79	81	88	76	80	77	84	79
Abangan	1999	36	19	5	9	Na	Na	12	Na	Na
	2004	36	26	11	11	30	19	13	Na	Na
	2009	35	21	19	12	24	20	23	16	21

Berdasarkan hasil survei tersebut, Muslim Indonesia dapat dikategorikan sebagai Muslim yang saleh atau termasuk kelompok santri. Namun demikian, sebagian dari mereka tidak memilih partai Islam dan tetap memilih partai-partai yang sekuler seperti Golkar dan PDIP pada Pemilu 1999 dan 2004, serta partai Demokrat pada

Pemilu 2009. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Indonesia, tidak hanya agama atau tingkat religiositas seseorang.

Jika hasil Pemilu legislatif di tingkat nasional mematahkan logika pembilahan sosial berdasarkan agama, maka hasil Pemilu legislatif untuk DPRD Kota Tasikmalaya berlaku sebaliknya. Mayoritas penduduknya yang beragama Islam diimbangi dengan dominasi anggota-anggota DPRD yang berasal dari Partai Islam. Tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis lain seperti pendidikan, pekerjaan serta kinerja pemerintah dapat kita lihat bahwa Islam menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan politik masyarakat.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pasca keruntuhan Orde Baru PPP telah menjadi partai yang selalu memperoleh suara terbanyak dalam setiap Pemilu. Bahkan ketika kecenderungan perolehan suara PPP semakin menurun di tingkat nasional, hal ini tidak terjadi di Kota Tasikmalaya. Walaupun terjadi penurunan, jumlahnya tidak terlalu banyak dan PPP tetap memperoleh suara terbanyak.

Selain PPP, partai Islam lain juga banyak yang memperoleh suara yang cukup besar di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Pemilu tahun 2009, 60% anggota DPRD Kota Tasikmalaya adalah dari partai-partai yang mempunyai basis massa Islam, yakni PPP memperoleh 8 kursi, PAN memperoleh 7 kursi, PKS memperoleh 4 kursi, PBR memperoleh 4 kursi, PBB memperoleh 3 kursi, dan PKB memperoleh 1 kursi.

Melihat komposisi anggota DPRD Kota Tasikmalaya tersebut cukup menarik, selain PPP yang memperoleh suara terbanyak, kita juga melihat partai-partai yang tidak lolos *Parliamentary Treshold* memperoleh kursi yang cukup banyak di DPRD Kota Tasikmalaya, seperti PBR dan PBB. Dari fenomena tersebut dapat kita lihat bahwa selain faktor Kyai, faktor agama Islam menjadi salah satu pertimbangan perilaku memilih seseorang.

Walaupun partai-partai tersebut tidak semua mengklaim partai mereka sebagai partai Islam namun partai-partai ini memiliki basis massa Islam atau berasal dari organisasi Islam. PPP menggunakan lambang Ka'bah yang secara jelas merupakan identitas masyarakat muslim, dan PPP sejak tahun 1998 telah kembali ke identitasnya sebagai partai Islam. PBB yang dalam sejarahnya sebagai ahli waris Masyumi, sesuai dengan namanya menggunakan lambang bulan sabit dan bintang yang mengingatkan orang dengan lambang partai Masyumi. Dan PKS menggunakan lambang Ka'bah yang dipadukan dengan bulan sabit dan untaian padi yang tegak lurus. Melalui lambang partai-partai tersebut dengan jelas kita dapat melihat bahwa lambang tersebut menggambarkan identitas partai mereka sebagai partai Islam dan pemilih mereka sebagai wakil dari komunitas Islam. Dengan cara ini mereka mencoba meyakinkan para pemilih dari komunitas Islam untuk bergabung dengan mereka dan mereka mencoba mengusung kebijakan yang terdengar memperkuat identitas dan hak-hak orang Islam.

Sementara untuk Partai Bintang Reformasi (PBR) yang merupakan pecahan dari PPP, secara ideologi partai ini telah menyatakan diri sebagai partai Islam, salah satu lambangnya adalah bintang yang berjumlah lima buah merupakan simbol dari lima rukun Islam. PBR tidak bisa lepas dari sosok KH. Zainuddin MZ (Alm) sebagai tokoh pendirinya dan juga merupakan sosok Kyai besar di Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penarik bagi para pemilih yang berasal dari komunitas Islam, termasuk di Tasikmalaya. Namun karena tidak lolos *parliamentary threshold*, pada tahun 2012 ini PBR telah menggabungkan diri dengan PAN.

Adapun untuk PKB dan PAN, mereka tidak menyatakan diri mereka sebagai partai Islam, dalam pendiriannya baik PKB maupun PAN memilih Pancasila sebagai ideologi mereka, bukan Islam. Namun cukup sulit juga untuk meletakkan PKB dan PAN sebagai partai yang sekuler. Seperti yang telah kita ketahui, pada awal pendiriannya PKB tidak lepas dari sosok Gus Dur atau Matori Abdul Jalil yang merupakan pemimpin NU, sementara PAN didirikan oleh Amin Rais yang sebelumnya menjabat

sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Untuk afiliasi terhadap partai politik Islam tertentu, hal ini kemudian dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti organisasi keagamaan yang diikuti, Kyai tempat ia mengaji, serta informasi politik yang diperoleh mengenai partai-partai dan kandidat yang berkompetisi. Dari berbagai faktor tersebut, faktor organisasi keagamaan dinilai mempunyai peran penting dalam menentukan afiliasi seseorang terhadap suatu partai politik.

Dalton (2002) menyebutkan bahwa Secara umum partai politik mempertahankan ikatan institusi dan ideologinya kepada kelompok sosial tertentu, banyak partai yang menggantungkan diri pada suara dari grup *clientnya*, untuk menjamin basis dukungan elektoral yang stabil. Beberapa studi terdahulu telah menekankan keterikatan dengan suatu kelompok/ organisasi sosial sebagai sebuah faktor penting yang mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Kelompok sosial dianggap dapat menjadi referensi penting dalam memberikan orientasi kepada pemilih mengenai isu politik dan menyediakan informasi politik

Keterlibatan dalam perkumpulan kewargaan dan ketertarikan terhadap politik juga cenderung berpengaruh langsung pada partisipasi politik. Menurut Olsen (dikutip oleh Mujani, dkk: 2012):

Partisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan non politik yang bersifat sukarela dan menyalurkan kepentingan khusus (*special interest*), pada saatnya akan membuat seseorang aktif secara politik. Ada berbagai alasan mengapa partisipasi semacam ini bisa meningkatkan aktivitas politik seseorang: (1) partisipasi itu memperluas wawasan seseorang mengenai minat, kepentingan dan kepedulian, sehingga urusan-urusan publik menjadi penting baginya. (2) partisipasi itu membawa seseorang berhubungan dengan orang-orang baru beraneka ragam, dan ini membuatnya peduli pada masalah-masalah public, dan menjadi aktif dalam kegiatan politik. (3) partisipasi itu membantu menambah informasi seseorang, melatihnya dalam berinteraksi sosial, membuatnya lebih terampil dalam memimpin dan

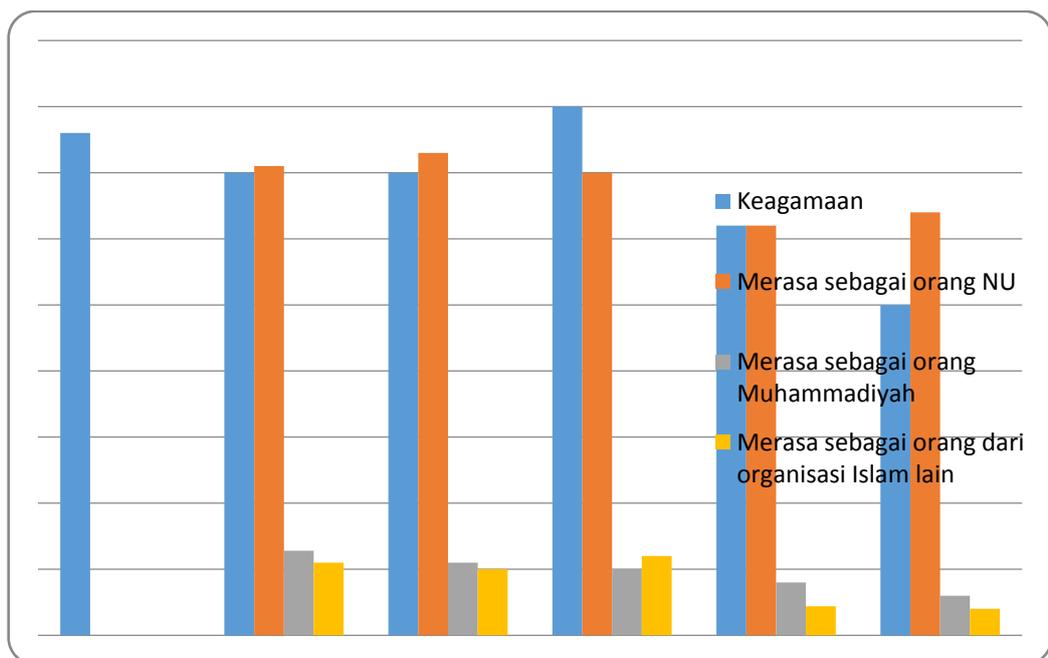
mengambil sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk aksi politik yang efektif. (h.318)

Keterlibatan dalam kelompok sosial melalui kelompok sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, dan kelompok-kelompok sosial non keagamaan seperti karang taruna, arisan, rapat, rukun tetangga (RT), organisasi profesi dan organisasi hobi, membuka informasi dan komunikasi mengenai masalah publik, sehingga mendorong warga Negara terkait dengan masalah tersebut. Selain itu orang-orang yang terlibat dalam kelompok sosial sangat mungkin siap terlibat dalam mobilisasi politik oleh kelompok tersebut. (Mujani, dkk: 2012)

Grafik 1 menunjukkan hasil survei LSI dari tahun 1999 – 2009 yang menunjukkan tingkat keterlibatan warga dalam kegiatan sosial-keagamaan, dan tingkat identifikasi warga dengan ormas keagamaan tertentu (NU, Muhammadiyah, dan lainnya). Berdasarkan hasil survey tersebut, sekitar empat dari 10 pemilih Indonesia terlibat dalam kegiatan sosial secara umum. Dalam proporsi yang kurang lebih sama, 31-36% mengaku sebagai orang, sekitar 5-6% mengaku sebagai orang Muhammadiyah, dan dalam proporsi yang sama mengaku sebagai orang organisasi keagamaan Islam lainnya. Total identifikasi diri dengan kelompok atau organisasi keagamaan ini sekitar 40%. Ini artinya, sebagian dari warga mengaku sebagai orang dari kelompok keagamaan Islam tertentu, dan separuhnya lagi bukan orang dari organisasi atau kelompok Islam manapun. (Mujani, dkk, 2012: hal. 179-180)

Grafik 1

Keanggotaan dan identifikasi diri dengan organisasi sosial-keagamaan (%)



Dengan melihat hasil survei di tingkat nasional tersebut dan membandingkannya dengan konteks masyarakat kota Tasikmalaya yang mayoritas warga muslim, dan mereka mengafiliasikan diri dengan organisasi-organisasi keislaman, maka kita dapat melihat bagaimana organisasi keislaman mampu mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kota Tasikmalaya. Dan seperti halnya dalam survei tersebut, mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya merupakan warga NU, sebagian kecil ada Muhammadiyah, Persis, Darul Arqam, dan lain-lain.

Dari organisasi-organisasi yang ada tersebut, memang tidak sepenuhnya berafiliasi dengan salah satu partai, namun ada kecenderungan mayoritas anggota sebuah organisasi yang mengafiliasikan diri dengan partai tertentu, salah satu yang paling

solid adalah warga Muhammadiyah yang mempunyai kecenderungan dengan PAN, Persis dengan PBB, walaupun tidak sedikit juga yang memilih partai lain, baik partai Islam maupun sekuler. Sementara untuk warga NU, pilihan partai politik mereka cenderung terbagi-bagi, sebagian besar ke PPP, kemudian PBR dan PKB, selain itu warga NU juga banyak mengafiliasikan diri dengan Partai Golkar, Demokrat, PDIP, dan lain-lain.

Terpecahnya suara NU ini tidak terlepas dari sejarah politik antara NU dan PPP. Pada awal pembentukannya PPP merupakan hasil fusi dari partai-partai Islam termasuk NU. Namun kemudian kondisi tersebut mulai berubah pasca dirumuskannya *khittah* pada Muktamar NU tahun 1984. Ada dua hal penting yang dipancarkan dalam rumusan itu (A Gaffar Karim, 1995). *Pertama*, penegasan tentang dimensi baru gerakan politik NU, yang tidak lagi bermuatan politik praktis kelembagaan. Dan *kedua*, penegasan netralitas NU terhadap setiap organisasi politik.

Netralitas politik disini kemudian berarti NU melepaskan afiliasinya terhadap PPP untuk menjaga jarak yang sama terhadap partai politik lainnya. Pada awalnya beberapa tokoh NU di PPP menolak untuk keluar dari PPP, namun konflik dan kekecewaan atas pimpinan PPP saat itu, Naro, telah mengakibatkan apa yang dikenal dengan “penggembosan PPP” yakni terjadinya perpindahan dukungan besar-besaran tokoh dan warga NU dari PPP ke Golkar, sehingga pada Pemilu tahun 1987 PPP kehilangan suara yang cukup besar di basis massanya, seperti di Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun kemudian, pasca Pemilu tersebut dilakukan perombakan formasi dalam kepemimpinan partai dan rekonsiliasi antara PPP dan NU mulai dilakukan. Sehingga pada Pemilu Tahun 1992, banyak Kyai NU yang “pulang kandang” ke PPP.

Parpol Islam dan Kyai Dalam Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2012

Pada tanggal 9 Juli 2012 lalu telah diselenggarakan pemilihan walikota untuk periode tahun 2012-2017. Dalam Pilkada ini cukup menarik untuk melihat bagaimana peran parpol Islam dan Kyai dalam mendukung salah satu kandidat dan memenangkan pemilihan tersebut. Pilkada Kota Tasikmalaya ini juga menambah catatan kekalahan *incumbent* dalam Pilkada yang diselenggarakan di Indonesia.

Peserta Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2012 diikuti oleh tiga pasangan, dua pasangan diusung oleh koalisi partai politik dan satu kandidat merupakan kandidat independen (perseorangan). Pasangan pertama adalah H. Budi Budiman dan H. Dede Sudrajat, Ir. MP. Kedua kandidat tersebut merupakan dua orang pengusaha besar di Kota Tasikmalaya dan keduanya merupakan kader PPP. H. Budi Budiman sendiri merupakan Ketua Umum DPC PPP Kota Tasikmalaya. Pada Pilkada sebelumnya H. Budi Budiman juga mencalonkan diri sebagai walikota, namun kalah. Salah satu faktor kekalahannya adalah karena ada dua kader PPP yang bersaing, yakni H. Dede Sudrajat yang waktu itu berpasangan dengan H. Syarif Hidayat dan akhirnya memenangkan Pilkada tersebut. Pada Pilkada kali ini pasangan H. Budi Budiman dan H. Dede Sudrajat didukung oleh PPP, PKS, PBB, PBR, dan Partai Demokrat. Pasangan kedua adalah H. Mumung Marthasasmita dan H. Taufik Faturrohman. Pasangan ini merupakan kandidat independen.

Pasangan ketiga adalah H. Syarif Hidayat dan H. Cecep Bagja Gunawan. H. Syarif Hidayat merupakan kader PAN dan juga seorang *incumbent*. Pada Pilkada ini pasangan tersebut didukung oleh PAN, Golkar, PDIP dan Gerindra.

Berdasarkan partai pengusungnya, kedua kandidat yang diusung parpol mempunyai karakteristik parpol yang cukup berbeda. Untuk pasangan H. Budi Budiman dan H. Dede Sudrajat didukung oleh partai-partai Islam yakni PPP, PKS, PBB dan PBR, ditambah dukungan Partai Demokrat. Berdasarkan hasil Pemilu legislatif tahun 2009, gabungan suara dari keempat parpol tersebut mencapai 52.6%. Sementara untuk pasangan H. Syarif Hidayat dan H. Cecep Bagja Gunawan didukung oleh partai-partai yang cenderung sekuler, yakni Golkar, PDIP, Gerindra dan PAN yang

walaupun mempunyai basis massa Muhammadiyah namun partai ini tidak berasas Islam. Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009, perolehan suara dari keempat parpol tersebut mencapai 35.64%.

Dalam pertarungan Pilkada ini tidak hanya melibatkan partai politik, namun juga ada peran para Kyai yang ikut memberikan dukungan kepada salah satu kandidat, yakni terhadap H. Budi Budiman dan H. Dede Sudrajat. Jika dilihat dari latar belakang agama para kandidat, semuanya beragama Islam, dan disinilah peran Kyai untuk menentukan siapa kandidat yang paling pantas didukung, dan tentu saja dengan menggunakan alasan keagamaan. Para Kyai ini kemudian memberikan pernyataan dukungan resmi didasarkan hasil *istikharah* ratusan Kyai yang kemudian sepakat mendukung pasangan H. Budi Budiman dan H. Dede Sudrajat sebagai pasangan terbaik untuk memimpin Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan perhitungan hasil suara yang dilakukan oleh KPUD Kota Tasikmalaya, Pilkada tersebut dimenangkan oleh pasangan H. Budi Budiman dan H. Dede Sudrajat dengan perolehan suara 58.02%. Sementara sang *incumbent* hanya memperoleh 33.78% suara dan pasangan independen memperoleh 8.20% suara.

Temuan menarik dari hasil Pilkada ini adalah jika kita asumsikan semua pemilih memilih kandidat berdasarkan partai politik yang mereka pilih pada saat Pemilu Legislatif tahun 2009, maka pasangan H. Budi Budiman dan H. Dede Sudrajat memperoleh tambahan suara sebesar 5,42%, sementara pasangan H. Syarif Hidayat dan H. Cecep Bagja Gunawan kehilangan 1,86% suara. Masih dengan menggunakan asumsi yang sama dan kita gunakan faktor sosiologis agama dan peran Kyai dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, maka penambahan suara pasangan H. Budi Budiman dan H. Dede Sudrajat bisa jadi berasal dari para pemilih parpol Islam lain yang tidak memberi dukungan resmi terhadap salah satu kandidat, seperti PKB yang pada tahun 2009 memperoleh 4.2% suara atau bisa juga dari para pemilih partai sekuler yang mempunyai kedekatan atau kepatuhan terhadap para ulama. Hal ini memang belum dilakukan penelitian lebih mendalam, namun berdasarkan

pengamatan penulis peran Kyai cukup dipertimbangkan untuk menentukan pilihan masyarakat. Karena seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, para Kyai di Kota Tasikmalaya banyak yang berafiliasi dengan partai politik, terutama PPP, dan PPP merupakan partai yang selalu memenangkan Pemilu di Kota Tasikmalaya.

Selain itu, kemenangan pasangan H. Budi Budiman dan H. Dede Sudrajat ini juga semakin mengokohkan eksistensi partai-partai Islam di Kota Tasikmalaya. Jika kita asumsikan kembali para pemilih memilih berdasarkan partai pengusungnya, maka dapat kita lihat keterikatan antara partai dan konstituen cukup erat, para konstituen memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap parpolnya. Jika kita melihat kembali sejarah PPP di Kota Tasikmalaya yang terus memenangkan setiap Pemilu, maka kita bisa mengatakan bahwa terdapat sebuah keadaan psikologis, yakni perasaan dekat dengan, sikap mendukung atau setia pada, atau identifikasi diri dengan partai politik tertentu (*partisanship*), dalam hal ini PPP. *Partisanship* yang mengidentifikasi diri seseorang dengan suatu partai politik ini kemudian disebut sebagai *party ID*. Dengan demikian, tanpa mempertimbangkan faktor pendidikan dan pekerjaan, disini dapat kita lihat faktor psikologis yakni *party ID* yang kemudian dipengaruhi oleh faktor sosiologis yakni agama dan organisasi keagamaan banyak mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kota Tasikmalaya.

Hal ini sangat berbeda dengan hasil Pilkada DKI tahun 2012, dimana petahana dengan dukungan partai-partai besar bisa dikalahkan oleh pasangan Jokowi-Ahok yang diusung PDIP dan Gerindra. Walaupun memang ada faktor-faktor serta karakteristik pemilih yang berbeda antara masyarakat Jakarta dan Kota Tasikmalaya. Perbandingan ini hanya untuk melihat bagaimana bekerjanya mesin-mesin partai politik di masyarakat, serta bagaimana keterikatan partai dengan konstituen (*party ID*), dan *electoral volatility*. Dengan membandingkan kedua hasil tersebut, dalam masyarakat yang cenderung homogen seperti Kota Tasikmalaya, faktor psikologis (*party ID*) dan faktor sosiologis (agama serta organisasi

keagamaan) yang kemudian satu sama lain saling berkorelasi dengan adanya peran Kyai sebagai pemimpin keagamaan yang juga berafiliasi dengan partai politik, cenderung dapat menjaga kestabilan perolehan suara sebuah partai politik.

Mengapa para santri sangat patuh terhadap Kyai?

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, para Kyai mampu mempengaruhi perilaku pemilih terutama di kalangan santri, mengapa demikian?

Hal ini terkait dengan mayoritas penduduk Kota Tasikmalaya yang merupakan muslim dan mengafiliasikan diri sebagai warga NU. Selain itu, dengan banyaknya jumlah pesantren di Kota Tasikmalaya, maka banyak dari masyarakat juga pernah mengenyam pendidikan pesantren, baik menjadi santri mukim, maupun sebagai *santri kalong*.¹ Massa NU ini pada dasarnya terbagi dalam komunitas-komunitas kecil seperti sel-sel pada sebuah organisme yang masing-masing memiliki *nucleus* berupa Kyai-Kyai lokal. (A. Gaffar Karim, 1995; Hal:89). Keberadaan Kyai ini biasanya dicirikan dengan adanya sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional pesantren.

Salah satu nilai penting dalam tradisi pesantren adalah hubungan antara Kyai dan santri yang nyaris sakral. Hubungan ini disebut sebagai *ta'zim* yakni sikap hormat atau kepatuhan seorang santri terhadap Kyainya yang bersifat mutlak dan tidak terputus, berlaku sepanjang hidup seorang santri. Hal ini merupakan inti dari ajaran kitab *Ta'limul Muta'alim Ta'limul Muta'alim* yang diajarkan di berbagai pesantren tradisional NU.

Dalam Kitab *Ta'limul Muta'alim*, diajarkan bahwa seorang santri harus *ta'zim* (hormat) terhadap gurunya. Dalam kitab tersebut juga disebutkan bahwa seorang

¹ Sebutan untuk santri pribumi yang hanya datang ke pesantren untuk mengaji pada malam hari.

murid (santri) tidak akan mendapat ilmu dan tidak akan bermanfaat ilmunya kecuali dengan mengagungkan ilmu dan ahlinya, diantaranya dengan cara:

1. Tidak boleh berjalan didepan guru (Kyai)
2. Tidak boleh duduk di tempat duduknya
3. Tidak boleh mendahului berbicara didekat Kyai kecuali mendapat izinnya
4. Tidak boleh banyak berbicara didekat Kyai
5. Tidak boleh bertanya yang akan membuat bosan Kyai
6. Tidak boleh terus mengetuk pintunya, tetapi sabar menunggu Kyai keluar
7. Harus taat kepada perintah guru (Kyai) dalam hal yang tidak bertentangan dengan Tuhan
8. Harus menjauhi perilaku yang tidak disukai Kyai
9. Harus hormat (*ta'zim*) kepada putra-putrinya

Sikap hormat dan kepatuhan mutlak kepada Kyai sebagai guru ini bukanlah manifestasi penyerahan total kepada guru yang dianggap memiliki otoritas, melainkan karena keyakinan bahwa guru adalah penyalur kemurahan Tuhan yang dilimpahkan kepada murid-muridnya. (A. Gaffar Karim, 1995; Hal. 90). Dengan adanya tata nilai atau konsep *ta'zim* ini maka kedudukan Kyai menjadi sangat tinggi dalam kehidupan santri dan bahkan pada masyarakat sekitarnya.

Kyai kemudian tidak hanya menjadi rujukan atas permasalahan keagamaan, Kyai juga dituntut untuk bersikap adaptif dan responsif terhadap perkembangan sosial dan politik di masyarakat. Keberadaan Kyai dalam partai politik dengan karismanya seringkali digunakan untuk menarik massa, terutama kelompok santri. Selain itu, karena Kyai dianggap sebagai pemimpin karismatik dalam masyarakat dan mempunyai massa, para kandidat baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun

Pilkada seringkali berlomba-lomba untuk memperoleh dukungan dari para Kyai tersebut.

Hubungan antara Kyai dan santri terus berlangsung meskipun santri tersebut sudah keluar dari pesantren. Hubungan antara santri dan Kyai serta hubungan antar santri terus dibina, salah satunya melalui kegiatan temu alumni yang diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hampir di semua pesantren di Kota Tasikmalaya mempunyai tradisi temu alumni. Dengan adanya pertemuan rutin tersebut maka terbangun jejaring Kyai dan santri, serta antar santri.

Selain dengan adanya pertemuan temu alumni tersebut, hubungan santri dengan institusi pesantren juga dibangun melalui jejaring institusi pesantren. Hal ini seperti yang dilakukan para santri alumni pesantren Miftahul Huda, setelah keluar dari pesantren dan kembali ke masyarakat biasanya mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai guru mengaji. Santri tersebut kemudian banyak yang mendirikan pesantren sendiri di daerahnya, dan pesantren yang mereka bangun selalu mengafiliasikan diri atau menginduk dengan pesantren tempatnya belajar, yakni pesantren Miftahul Huda.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat kota Tasikmalaya. Hal menarik dari perilaku memilih masyarakat Kota Tasikmalaya adalah ketika trend suara partai Islam cenderung terus menurun, maka hal sebaliknya terjadi di Kota Tasikmalaya. PPP selalu memenangkan Pemilu pasca Orde Baru, dan berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999, 60% anggota DPRD Kota Tasikmalaya berasal dari partai-partai Islam atau partai yang mempunyai basis massa Islam.

Faktor sosiologis agama dalam hal ini Islam, dan organisasi keagamaan seperti NU, Persis dan Muhammadiyah diyakini memberi pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kota Tasikmalaya. Selain itu PPP yang

merupakan partai Islam hasil fusi pada masa pemerintahan Orde Baru dari partai-partai Islam sebelumnya, salah satunya NU telah menciptakan *partisanship* yang kemudian mengidentifikasi seseorang dengan PPP (*party ID*). Dengan demikian, tanpa mempertimbangkan faktor pendidikan dan pekerjaan, disini dapat kita lihat faktor psikologis yakni *party ID* yang kemudian dipengaruhi oleh faktor sosiologis yakni agama dan organisasi keagamaan banyak mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kota Tasikmalaya.

Disamping itu, adanya peran Kyai sebagai pemimpin keagamaan yang juga berafiliasi dengan partai politik, cenderung dapat menjaga kestabilan perolehan suara sebuah partai politik. Kyai merupakan tokoh masyarakat, pemimpin keagamaan yang dianggap mempunyai karisma sehingga dianggap mampu mempengaruhi perilaku memilih, terutama di kalangan santri. Karisma seorang Kyai dan statusnya di masyarakat membuat keberadaan Kyai dalam sebuah partai politik dianggap mampu menarik suara massa. Hubungan antara Kyai dan santri nyaris sakral, hal ini terkait dengan salah satu konsep yang diajarkan di pesantren yakni sikap *ta'zim*, yakni sikap hormat dan patuh seorang santri terhadap gurunya (Kyai). Hubungan antara santri dan Kyai sifatnya terus berlangsung meskipun santri tersebut sudah keluar dari pesantren, salah satunya dibina melalui acara temu alumni yang diselenggarakan satu tahun satu kali, dan melalui jaringan pesantren yang mengindukkan diri dengan pesantren tempat Kyai belajar mengaji sebelumnya.

Daftar Pustaka

“Indonesia sebagai Model Perkembangan Demokrasi Muslim, Masalah, dan Peluang”, tersedia di <http://www.setkab.go.id/artikel-6197-.html> , diakses tanggal 3 Desember 2012.

- Aziz, Abdul. 2006. *Politik Islam Politik : Pergulatan Ideologis PPP menjadi Partai Islam*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Dalton, Russel J. 2002. *Citizen Politics : Public Opinion and Political Parties In Advanced Industrial Democracies*. New York : Seven Bridges Press
- Faridl, Miftah. 2003. "Peran Sosial Politik Kyai Di Indonesia. ", *Mimbar*, Vol. XIX, No. 2, hal. 205-212
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priyayidalam Masyarakat Jawa*. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya
- , 1968. *Islam Observed : Religious Development In Morocco and Indonesia*. New Haven : Yale University Press
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta : PT. Temprint
- Karim, A Gaffar. 1995. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Lili Romli, dkk. 2003. *Potret Partai Politik Pasca Orde baru*. Jakarta : Pusat Penelitian Politik – LIPI
- Mujani, Saiful, dkk, 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta : Mizan
- Sholichin, Mochammad Muchlis. 2009. "Perilaku Politik Kyai Di Pamekasan", *Karsa*, Vol XV, No. 1, hal. 35-43.
- Sosial Budaya, <http://tasikmalayakota.go.id/home.php?show=sosbud>, diakses tanggal 28 November 2012.